



Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik Pada Instansi Pemerintah

Gustria Salwa Khairani¹, Isra Maulina¹

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

gustriasalwa2@gmail.com¹ isramaulina@uinsuna.ac.id¹

Abstract

The analysis of the application of public sector accounting in government agencies aims to assess the level of transparency, accountability, and effectiveness of state financial management. Public sector accounting, as a component of accounting, plays a crucial role in providing relevant and reliable financial information to stakeholders. The implementation of standards such as the Government Accounting Standards encourages the preparation of financial reports in accordance with the accrual principle, thereby improving reporting quality. However, in practice, various obstacles remain, such as limited human resources, suboptimal information systems, and poor understanding of regulations. Therefore, efforts are needed to improve the competence of government officials, strengthen internal control systems, and utilize information technology to support more effective and efficient implementation.

Keywords: Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Akuntabilitas, SAP Akrua, Transformasi Digital.

Abstrak

Analisis penerapan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah bertujuan untuk menilai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Akuntansi sektor publik, sebagai bagian dari Akuntansi, berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan. Penerapan standar seperti Standar Akuntansi Pemerintahan mendorong penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akrual, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung implementasi yang lebih efektif dan efisien.

Keywords: Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Laporan Keuangan Pemerintah, SAP

1. INTRODUCTION

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam konteks instansi pemerintah, penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian, evaluasi kinerja, serta dasar pengambilan keputusan. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas publik, sistem akuntansi pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Di Indonesia, penerapan akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan sistem berbasis akrual, pemerintah dapat menyajikan informasi yang lebih komprehensif terkait aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja Negara sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara namun demikian, implementasi akuntansi sektor publik di instansi pemerintah tidak terlepas dari berbagai tantangan salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi pemerintahan selain itu, masih terdapat permasalahan dalam sistem informasi akuntansi, koordinasi antar unit kerja, serta pemahaman yang belum merata terhadap regulasi yang berlaku kondisi ini dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta efektivitas pengawasan internal lebih lanjut, penerapan akuntansi sektor publik juga berkaitan erat dengan prinsip *Good Governance*, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum oleh karena itu, instansi pemerintah dituntut untuk tidak hanya mematuhi standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat.

Diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, analisis terhadap penerapan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah menjadi penting untuk dilakukan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi akuntansi telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mengungkap berbagai kendala yang dihadapi dalam praktiknya dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi standar akuntansi pemerintahan dalam praktik. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, seperti bendahara dan staf akuntansi. Observasi dilakukan untuk melihat proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara langsung, sedangkan dokumentasi mencakup laporan keuangan, kebijakan internal, serta regulasi terkait. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian penerapan akuntansi sektor publik dengan standar yang berlaku serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan pada organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, sektor publik memiliki tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurut konsep dalam Akuntansi Sektor Publik, laporan keuangan pemerintah harus mampu memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, legislatif, dan lembaga pengawas hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance yang menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara. Dalam konteks Indonesia, penerapan akuntansi sektor publik diatur melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menetapkan penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah. Penerapan basis akrual ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Dengan sistem ini, transaksi dicatat pada saat terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan dalam praktiknya, penerapan akuntansi sektor publik tidak terlepas dari peran lembaga

pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara hasil pemeriksaan BPK menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas instansi Pemerintah opini yang diberikan, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencerminkan kualitas.

Laporan keuangan yang disusun oleh instansi tersebut slain itu, konsep akuntabilitas publik juga menjadi fokus utama dalam kajian ini akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat hal ini mencakup tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga kinerja program dan kebijakan. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik sering dikaitkan dengan sistem pengukuran kinerja dan evaluasi program pemerintah teori yang mendasari akuntansi sektor publik antara lain adalah teori agensi (Agency Theory), yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal dalam hubungan ini, terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat diminimalkan melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akurat. Selain itu, teori Stewardship juga relevan, di mana pemerintah dianggap sebagai pengelola amanah yang harus bertindak demi kepentingan publik. Penerapan akuntansi sektor publik juga berkaitan erat dengan konsep Value For Money, yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan anggaran instansi Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menggunakan dana secara tepat, tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang optimal bagi masyarakat oileh karena itu, sistem

Akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks implementasi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia beberapa diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi, serta sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan tingkat akuntabilitas instansi Pemerintah. Namun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi keuangan, serta penguatan regulasi. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan Negara juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan adanya sistem berbasis teknologi, proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik pada instansi Pemerintah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan mengacu pada standar yang berlaku, didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, serta komitmen dari seluruh pihak terkait, diharapkan pengelolaan

keuangan Negara dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

3.2. Dasar Hukum Dan Standar

Dasar hukum dan standar merupakan landasan penting dalam setiap bidang, baik itu pendidikan, ekonomi, pemerintahan, maupun sektor lainnya dasar hukum berfungsi sebagai pijakan normatif yang mengatur tindakan, kewenangan, serta tanggung jawab suatu pihak, sedangkan standar menjadi acuan teknis yang memastikan kualitas, konsistensi, dan keseragaman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum biasanya bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berjenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan daerah. Misalnya, dalam sektor Pemerintahan, penerapan sistem administrasi dan akuntansi publik diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang tentang keuangan Negara dan standar akuntansi Pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang baik selain itu, dalam bidang pendidikan, dasar hukum juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Undang-undang yang mengatur pendidikan menetapkan tujuan, fungsi, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan, termasuk standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Dengan adanya dasar hukum ini, penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara terarah dan sistematis sementara itu, standar berfungsi sebagai pedoman operasional yang bersifat lebih teknis standar dapat berupa standar nasional, internasional, mau pun standar khusus yang ditetapkan oleh lembaga tertentu. Contohnya adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dipahami dan dibandingkan secara luas standar ini penting untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, relevan, dan dapat dipercaya dalam praktiknya, dasar hukum dan standar saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dasar hukum memberikan legitimasi terhadap penerapan suatu standar, sedangkan standar membantu mengimplementasikan ketentuan hukum secara lebih konkret tanpa dasar hukum, standar tidak memiliki kekuatan mengikat, dan tanpa standar, dasar hukum akan sulit diterapkan secara efektif di lapangan. Penerapan dasar hukum dan standar juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta perubahan dinamika sosial dan teknologi oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, pelatihan, serta pembaruan regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

3.3. Tujuan Penerapan

Penerapan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah memiliki tujuan utama untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui sistem akuntansi yang baik, setiap penggunaan anggaran dapat dicatat, dilaporkan, dan dipertanggung jawabkan secara jelas kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Hal ini penting karena dana yang dikelola Pemerintah berasal dari publik, sehingga harus digunakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu, penerapan akuntansi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan sesuai standar memungkinkan pimpinan instansi Pemerintah untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja keuangan dengan lebih efektif dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi pembangunan. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan, instansi Pemerintah dapat menghindari penyimpangan serta meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan Negara selain itu, akuntansi sektor publik juga berfungsi sebagai alat pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, guna mencegah. Terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3.4. Basis Akuntansi Yang Digunakan

Dalam akuntansi sektor publik, basis akuntansi yang digunakan sangat menentukan bagaimana transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan terdapat dua basis utama yang digunakan, yaitu basis kas dan basis akrual. Namun, dalam praktik pemerintahan di Indonesia, sering digunakan kombinasi keduanya yang dikenal sebagai basis kas menuju akrual basis kas adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan dan belanja pada saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Kelebihan dari basis ini adalah kesederhanaannya serta kemudahan dalam pengendalian arus kas oleh karena itu, basis kas banyak digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah. Sementara itu, basis akrual adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, tanpa menunggu arus kas terjadi basis ini memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan suatu instansi, karena mencerminkan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki. Dengan basis akrual, laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk pengambilan keputusan jangka panjang dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia mengadopsi basis akrual secara penuh sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku penerapan basis akrual ini bertujuan untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara meski pun demikian, laporan tertentu seperti laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas agar tetap mencerminkan pelaksanaan anggaran secara nyata dengan demikian, penggunaan basis akuntansi dalam sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai metode pencatatan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemilihan dan penerapan basis yang tepat akan mendukung terciptanya tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

3.5. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau daerah dalam suatu periode tertentu, laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa jenis. Laporan keuangan Pemerintah yang wajib disusun :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. LRA berfungsi untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran serta mengetahui sejauh mana realisasi sesuai dengan rencana.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih yang berasal dari sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran tahun sebelumnya. LPSAL penting untuk menunjukkan kondisi keuangan yang berkaitan dengan sisa anggaran yang dapat digunakan pada periode berikutnya.
3. Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Pemerintah pada tanggal tertentu, yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kekayaan dan kewajiban Pemerintah.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode, termasuk pendapatan operasional dan beban LO membantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas kinerja Pemerintah.
5. Laporan Arus Kas (LAK) menunjukkan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan LAK penting untuk mengetahui kemampuan Pemerintah dalam mengelola kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan perubahan ekuitas pemerintah yang terjadi selama periode pelaporan akibat Surplus atau defisit operasional serta transaksi lainnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi, rincian pos-pos laporan keuangan, serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan agar laporan dapat dipahami secara lebih jelas.

3.6. Proses Penerapan Di Instansi Pemerintah

Penerapan akuntansi sektor publik di instansi Pemerintah dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terintegrasi dan berkesinambungan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

1. Tahap awal dimulai dari perencanaan anggaran. Instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya dalam tahap ini ditentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode anggaran.
2. Pelaksanaan anggaran setiap unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan seluruh penggunaan dana harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan proses ini juga melibatkan pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran berbagai kewajiban.
3. Penatausahaan atau pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara sistematis menggunakan sistem akuntansi Pemerintah berbasis teknologi informasi pencatatan ini mencakup penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta ekuitas. Ketelitian dalam pencatatan menjadi faktor penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat.
4. Pelaporan keuangan data yang telah dicatat kemudian disusun menjadi laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan laporan lainnya. Laporan ini disusun secara periodik dan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik serta sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Evaluasi dan pengawasan instansi Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan untuk menilai pencapaian tujuan dan efektivitas penggunaan anggaran selain itu,

pengawasan dilakukan oleh aparat internal mau pun eksternal guna memastikan tidak adanya penyimpangan.

3.7. Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap penting dalam penerapan akuntansi sektor publik di instansi pemerintah. Tahap ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara atau daerah. Melalui pelaporan yang baik, pemerintah dapat menunjukkan transparansi serta kinerja dalam penggunaan anggaran. Pelaporan keuangan dilakukan secara periodik, biasanya setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar memiliki kualitas yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Jenis laporan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap laporan memiliki fungsi tersendiri.

Dalam memberikan gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh dalam proses pelaporan, data yang digunakan berasal dari pencatatan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, ketepatan dan keakuratan data sangat menentukan kualitas laporan yang dihasilkan selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan. Pertanggung jawaban merupakan kelanjutan dari pelaporan, dimana instansi pemerintah wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan masyarakat. Pertanggung jawaban ini biasanya disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh lembaga pemeriksa independen untuk menjamin keandalan informasi selain itu, pertanggung jawaban juga mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika laporan keuangan disusun dengan baik dan sesuai standar, maka kepercayaan publik terhadap Pemerintah akan meningkat sebaliknya, jika terdapat penyimpangan, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum dengan demikian, pelaporan dan pertanggung jawaban tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses ini memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan secara jelas, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

3.8. Kelebihan Penerapan

Penerapan akuntansi sektor publik di instansi pemerintah memiliki berbagai kelebihan yang signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik.

1. Meningkatnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan adanya sistem akuntansi yang terstruktur dan sesuai standar, setiap transaksi keuangan dapat dicatat dan dilaporkan secara jelas, sehingga memudahkan masyarakat dan pihak terkait untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan.
2. Akuntansi sektor publik memungkinkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan setiap penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang, seperti lembaga legislatif dan masyarakat hal ini mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih hati-hati dan profesional dalam mengelola keuangan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.
3. Penerapan akuntansi sektor publik juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan informasi keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi yang baik memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan instansi dengan demikian, pimpinan dapat membuat kebijakan yang lebih tepat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kerja.
4. Terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang sistematis, instansi Pemerintah dapat mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.
5. Penerapan akuntansi sektor publik juga mendukung pengawasan yang lebih baik sistem akuntansi yang jelas memudahkan proses audit, baik oleh pengawas internal maupun eksternal dengan demikian, potensi kesalahan dan kecurangan dapat dideteksi lebih dini.

3.9. Dampak Terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Penerapan akuntansi sektor publik memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sistem akuntansi yang baik memungkinkan setiap aktivitas keuangan Pemerintah dicatat dan dilaporkan secara sistematis, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya transparansi dalam

pengelolaan keuangan Negara dengan adanya laporan keuangan yang disusun sesuai standar, masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran secara lebih terbuka. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah, karena masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana yang berasal dari pajak dan sumber lainnya digunakan untuk kepentingan umum. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik juga memperkuat akuntabilitas. Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran melalui laporan keuangan yang jelas dan dapat diaudit hal ini mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas yang baik juga berperan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dampak lainnya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dengan informasi keuangan yang akurat, Pemerintah dapat mengidentifikasi program yang kurang efektif dan melakukan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran hal ini membantu Pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk.

Mencapai hasil yang maksimal penerapan akuntansi sektor publik juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat data keuangan yang tersedia memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan instansi, sehingga pimpinan dapat merumuskan kebijakan yang lebih rasional dan berbasis data keputusan yang diambil pun menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem akuntansi yang baik meningkatkan kualitas pengawasan proses audit menjadi lebih mudah dilakukan karena data keuangan telah terdokumentasi dengan baik pengawasan yang efektif akan meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. CONCLUSION

Dasar hukum dan standar merupakan dua elemen yang sangat penting dalam menjamin keteraturan, keadilan, dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan dasar hukum memberikan arah dan legitimasi, sedangkan standar memastikan pelaksanaan yang konsisten dan berkualitas. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem yang efektif dan efisien dengan adanya dasar hukum yang kuat dan standar yang jelas, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu mau pun lembaga untuk memahami dan menerapkan dasar hukum serta standar yang berlaku, agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, tujuan penerapan akuntansi sektor publik

adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi prinsip utama yang ingin dicapai dengan sistem akuntansi yang terstandar, instansi Pemerintah dapat memberikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja, kepercayaan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, penerapan akuntansi sektor publik memberikan dampak positif yang besar terhadap tata kelola Pemerintahan transparansi dan akuntabilitas yang meningkat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas selain itu, efisiensi, efektivitas, serta kualitas pengambilan keputusan juga mengalami peningkatan yang signifikan.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Halim, 2016, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2018, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, 2006, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, 2014, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Kencana
- Mahmudi, 2004, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2022, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta: BPK RI.
- Harun, 2011, Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri, 2019, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Kemendagri.
- Haryanto, 2024, Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media.